

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN,
PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN TERHADAP APM
(ANGKA PARTISIPASI MURNI) DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Strata Satu (S1) Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Padang*



OLEH

DEVLIANA AURELLIN

2018/18060003

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN TERHADAP APM (ANGKA PARTISIPASI MURNI) DI INDONESIA

Nama : Devliana Aurellin
BP/NIM : 2018/18060003
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2023

Mengetahui,
Kepala Departmen Ilmu Ekonomi



Dr. Novva Zulfa Riani, S.E., M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001

Disetujui dan Disahkan Oleh :
Pembimbing



Dr. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS
NIP. 19610502 198601 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI




*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN, PENDAPATAN PERKAPITA DAN KEMISKINAN TERHADAP APM (ANGKA PARTISIPASI MURNI) DI INDONESIA

Nama : Devliana Aurellin
NIM/TM : 18060003/2018
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: D Dr. Sri Ulfa Sentosa, M.S	1. 
2	Anggota	: Isra Yeni, SE, M.SE	2. 
3	Anggota	: Ariusni, SE, M.Si	3. 

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devliana Aurellin
NIM/Th. Masuk : 18060003/2018
Tempat/ Tanggal Lahir : AMP 3 KATIANGAN, 23 Desember 1999
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Pilubang, jorong pudung, kel. Bawan, kec. Ampek Nagari, kab. Agam
No. Hp/Telephone : 082268344770
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan perkapita dan Kemiskinan terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali tertulis jelas dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan kepala departemen program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran didalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, 11 November 2022


Devliana Aurellin
NIM. 18060003

ABSTRAK

Devliana Aurellin (18060003) : “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Terhadap APM (Angka Partisipasi Murni) di Indonesia” Skripsi. Padang : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dibawah bimbingan Ibu DR. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, (2) pengaruh pendapatan perkapita, (3) pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi murni di Indonesia terhadap angka partisipasi murni di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari 33 provinsi di Indonesia tahun 2014-2021 yang diperoleh dari instansi terkait. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model* dibantu software Eviews 9.

Variabel yang digunakan adalah angka partisipasi murni jenjang sekolah menengah atas (Y), pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (X1), pendapatan perkapita (X2), kemiskinan (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memiliki berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (2) Pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni pada tingkat sekolah menengah atas di Indonesia (3) kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi murni sekolah menengah atas di Indonesia..

Kata Kunci : Angka partisipasi murni, Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, Kemiskinan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Terhadap Angka Partisipasi Murni di Indonesia”.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis menyadari pengetahuan yang dimiliki masih sangat terbatas. Bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sangat berarti bagi penulis dalam proses pembelajaran ini. Terima kasih kepada Ibu DR. Dra. Sri Ulfa Sentosa, MS selaku pembimbing penulis yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan masukan serta arahan dengan ikhlas demi kesempurnaan skripsi ini. Berikutnya, dengan segala kerendahan hati penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang sangat berjasa dalam mendidik penulis dengan rasa tulus dan kasih sayang serta memberikan dukungan baik moril maupun materil untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Idris, M. Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Novya Zulfa Riani, S.E., M.Si selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

4. Ibuk Israyeni SE. M. SE dan ibuk Ariusni, SE. M. Si selaku penguji yang telah memberikan ilmu, kritik dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
6. Kak Asma Lidya, Amd selaku admin Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan administrasi.
7. Senior-senior departemen Ilmu Ekonomi yang telah banyak memberikan bantuan dan saran kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
8. Rekan-rekan Departemen Ilmu Ekonomi angkatan 2018 tanpa terkecuali yang telah memberikan semangat, keceriaan dan mengukir cerita indah tak terlupakan untuk kehidupan penulis selama menjalani studi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Para sahabat terdekat yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan motivasi kepada penulis dengan tulus dan ikhlas.
10. Semua pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menjadi ladang ibadah bagi penulis, akhir kata penulis ucapkan *jazakumullahu khairan*.

Padang, Oktober 2022

Penulis

Devliana Aurellin

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	IV
I. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	11
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
II.KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1.Kajian Teori dan Tinjauan Pustaka	14
2.1.1 Teori Human Capital	14
2.1.2 Teori Human Investmen	16
2.1.3 Teori Net Entrolment	20
2.1.4. Teori Pengeluaran Pemerintah	23
2.1.5. Teori Pendapatan perkapita	29
2.1.6. Teori Kemiskinan	32
2.1.7. Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, dan Kemiskinan terhadap Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia	38
2.1.7.1. Hubungan Pengeluaran Pemerintah bidang pendidikan Dengan angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia	38
2.1.7.2 Hubungan Pendapatan perkapita dengan Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia	39
2.1.7.3. Hubungan Kemiskinan dengan Angka Partisipasi Murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia	40
2.2.Penelitian Terdahulu.....	41
2.3.Kerangka Konseptual	43
2.4.Hipotesis	44
III.METODE PENELITIAN	45
3.1.Jenis dan Sumber data	45
3.1.1.Jenis Data	45
3.1.2.Tempat dan Waktu Penelitian	45

3.1.3.Sumber Data.....	46
3.1.4.Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.2.Defenisi Operasional.....	47
3.3.Analisi Data.....	48
3.3.1.Analisis deskriptif.....	48
3.3.2. Analisis induktif.....	49
3.3.3.Estimasi parameter model.....	49
3.3.4.Pemilihan model terbaik.....	51
3.3.5.Uji asumsi klasik.....	53
3.3.6.Uji statistik.....	54
IV.HASIL dan PEMBAHASAN.....	56
4.1.Hasil Penelitian.....	56
4.1.1.Gambar lokasi Penelitian.....	56
4.1.2.Analisis Deskriptif.....	58
4.1.3.Analisis Induktif.....	61
4.2.Pembahasan.....	72
4.2.1.Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.....	72
4.2.2.Pengaruh pendapatan perkapita terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.....	74
4.2.3.Pengaruh kemiskinan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-propinsi di Indonesia.....	76
V.KESIMPULAN.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

1.1.Jumlah Sekolah Menengah Atas di Indonesia	3
1.2.Alokasi Anggaran Pemerintah Bidang Pendidikan di Indonesia	6
1.3.Angka Partisipasi murni SMA di Indonesia	6
1.4.PDRB Perkapita Di Provinsi di Indonesia	6
1.5.Persentase Penduduk Miskin di Indonesia	9
3.1.Defenisi operasional.....	47
4.1 Perkembangan jumlah penduduk Indonesia	57
4.2.Angka partisipasi murni SMA di Indonesia	58
4.3.Anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Indonesia	59
4.4. PDRB perkapita di Indonesia	60
4.5.Persentase penduduk miskin di Indonesia	61
4.6.Uji Chow	62
4.7.Uji Hausman	64
4.8.Uji Lagrange multiplier	64
4.9.Hasil estimasi Random Effect Model	65
4.10.hasil uji multikolinearitas	66
4.11. Hasil uji Heterokedastisitas	67

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kurva pertumbuhan pengeluaran menurut Warger	28
2.2. Kurva lorenz	35
2.3. Kurva rasio gini.....	36
2.4. Kerangka konseptual	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef, 2012). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyiratkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan adalah aspek penting di kehidupan masyarakat yang berperan memajukan kualitas hidup, makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik.

Untuk memenuhi sasaran tersebut, beragam usaha dilakukan pemerintah, contohnya dengan mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak

semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Indikator yang biasa digunakan guna menuju keberhasilan dengan program pembangunan pendidikan, yaitu ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, memanifestasikan kesetaraan untuk pendidikan, dan menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan (Kemendikbud, 2013)

Tema pembangunan Indonesia khususnya dibidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN III 2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) yang tersedia, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Peningkatan akses layanan pendidikan selalu diupayakan oleh pemerintah dalam rangka optimalisasi layanan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk terus berupaya dengan meningkatkan SDM dengan menambah fasilitas berupa pembangunan sekolah khususnya sekolah menengah atas sebab sekolah menengah atas di Indonesia terbilang cukup rendah dibandingkan sekolah menengah pertama dan sekolah dasar sehingga diharapkan pembangunan sekolah menengah atas akan mencetak lulusan yang siap untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (BPS, 2019). Pemerataan pembangunan sekolah menengah atas di Indonesia setiap tahunnya

mengalami peningkatan hal ini dapat di lihat pada Table 1.1 disajikan data jumlah sekolah menengah atas di Indonesia pada Tahun 2014-2021:

Tabel 1.1 jumlah Sekolah Menengah Atas
Provinsi Indonesia Tahun 2014-2021

Tahun	Jumlah Sekolah Menengah Atas (unit)	Laju(%)
2014	12.409	-
2015	12.513	0.84
2016	12.689	1,41
2017	13.495	6,35
2018	13.683	1.39
2019	13.944	1.91
2020	13.853	-0.65
2021	13.995	1.03

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS 2022).

Pada table 1.1 di atas rata-rata laju jumlah sekolah menengah atas mengalami fluktuasi yang mana rata-rata laju pada 2017 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun sebelumnya sebesar 1,41 persen kemudian meningkat sebesar 6,35 persen hal ini disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan yang terus melakukan perluasan akses layanan pendidikan. Pada awal tahun 2015 pemerintah hanya membuat pondasi kebijakan pembangunan, pada tahun 2016 pemerintah melakukan percepatan langkah dan bekerja secara nyata sehingga pada tahun 2017 pemerintah melakukan pemerataan pembangunan secara merata di Indonesia sehingga tahun-tahun selanjutnya pembangunan sekolah terus meningkat selama periode analisis (kemendikbud,2017).

Hal Ini akan mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia, ini disebabkan karena jumlah sekolah menengah atas tersebut mengalami peningkatan pembangunan Sekolah Menengah Atas.

Pemilihan angka partisipasi murni dalam penelitian ini dikarenakan angka partisipasi murni merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tertentu khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berusia 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu, yang mana di Indonesia sendiri angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas memiliki jumlah yang rendah dibandingkan angka partisipasi kasar dan angka partisipasi sekolah.

pernyataan tersebut diketahui bahwa salah satu yang menjadi masalah hingga saat ini di Indonesia adalah pendidikan yang masih belum merata. faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia kurang merata adalah kemiskinan, SDM (sumber daya manusia), rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi dan sarana dan prasarana sekolah (BPS 2022).

Daerah di Indonesia yang kualitas pendidikannya yang kurang ialah Indonesia bagian timur. Karena, disana bukan hanya sarana dan prasarananya yang kurang tetapi tenaga pendidikannya juga kurang, sehingga masih membutuhkan tenaga pendidik dari luar daerah dan dana serta pembanguna sekola sehingga terlihat dengan hanya beberapa provinsi saja yang memperlihatkan prestasi, Hanya beberapa provinsi seperti Indonesia Bagian Barat saja yang memadai fasilitas sarana dan prasaran serta memiliki kualitas dan sering muncul ke permukaan

dengan prestasinya sedangkan Indonesia Bagian Timur lainnya belum terlihat (BPS 2018).

Dalam mengatasi masalah ketidakmerataan angka partisipasi di bidang pendidikan ini, pemerintah pusat membuat program untuk angka partisipasi penduduk usia sekolah untuk bersekolah seperti pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), khususnya di Indonesia melalui RPJP 2005-2025 berupaya meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada sebagian besar provinsi di Indonesia setiap tahunnya sebagaimana yang tertera pada tabel 1.2 yang menyajikan data alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan pada tahun 2014-2021:

Tabel 1.2 Alokasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Tahun 2013-2019 (Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (Rp)	Laju(%)
2014	9,483,904,789,059	-
2015	7,567,399,650,433	-20.21
2016	14,625,563,241,241	93.27
2017	41,174,096,175,007	181.52
2018	64,459,470,523,424	56.55
2019	129,785,110,566,541	101.34
2020	137,689,225,974,132	6.09
2021	105,368,384,188,166	-23.47

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Republik Indonesia.(2022)

Table 1.2 diatas pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan tertinggi berada pada tahun 2020 sebesar 137,689,225,974,132 rupiah. Sedangkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan yang terendah berada pada tahun 2015 sebesar 7,567,399,650,433 rupiah. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia laju pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2014-2021 mengalami fluktuasi terlihat pada tahun 2019 yang mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 101.34 persen dari tahun sebelumnya sebesar 56.55.

Terjadinya peningkatan anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dari tahun 2016 hingga 2021 terutama disebabkan adanya penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi covid-19 dimana sebagian besar anggaran disebabkan oleh kebijakan pembangunan pendidikan dasar dan menengah seras Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kebijakan bantuan dana seperti beasiswa dan peningkatan SDM (Kementerian keuangan,2021)

Pernyataan di atas pada alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan mempengaruhi angka partisipasi Murni dimana ketika Alokasi anggaran pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mengalami peningkatan maka angka partisipasi murni di Indonesia akan mengalami peningkatan pula. Hal ini di dukung dengan adanya penelitian yang di lakukan oleh (weriantoni et al,2017) menyatakan bahawa terdapat hubungan positif antara pengeluaran

pemerintah bidang pendidikan terhadap angka partisipasi murni SMA/SMK. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Elfarabi,2018) menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang positif antara pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap Angka partisipasi kasar.

Penjelasan diatas dapat di tampilkan angka partisipasi murni pada tabel 1.3 dibawah ini yang menampilkan jumlah serta laju pertahun APM pada jenjang SMA di Indonesia pada tahun 2014-2021:

Tabel 1.3 Angka Partisipasi Murni SMA di Indonesi
Tahun 2014-2021 (dalam persen)

Tahun	Angka Partisipasi Murni SMA (%)	Laju(%)
2014	59.35	-
2015	59.71	0,61
2016	59.95	0,40
2017	60.37	0,70
2018	60.67	0.50
2019	60.84	0.28
2020	61.25	0.67
2021	61.65	0.65

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS 2022).

Table 1.3 di atas angka partisipasi murni di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan dimana angka partisipasin murni tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 61.65 persen yang artinya sekitar 60 persen penduduk indoensia yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang sekoah menenga atas. Sedangkan angka partisipasi murni terendah atau terkecil berada

pada tahun 2014 sebesar 59.35 yang artinya sekitar 59 persen penduduk Indonesia yang berusia 16-18 tahun bersekolah tepat waktu di jenjang sekolah menengah atas.

Rata-rata laju Angka Partisipasi Murni SMA mengalami peningkatan namun pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,28 hal ini terjadi diakibatkan terjadinya *learning loss* yang signifikan selama pandemi covid-19 seperti adanya putus sekolah.

Dari data di atas dapat diketahui bahwa Angka Partisipasi Murni di Indonesia sendiri masih rendah dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Sekolah (BPS, 2022). Sehingga guna meningkatkan APM terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut: (Bappeda Banten, 2018) :

1. Strategi kebijakan pemerataan akses pendidikan

Peningkatan akses keterjangkauan dilakukan melalui dua hal, pertama melalui pembiayaan operasional sekolah melalui dana BOS dan BOPDA dan kedua melalui pembangunan unit sekolah baru, dan ruang kelas baru maupun rehab ruang belajar

2. Strategi peningkatan peran SKPD

Pencapaian target akses pendidikan dalam rangka mendorong pemerataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama atas masyarakat, pemerintah maupun swasta. Koordinasi lintas SKPD dengan pembagian kewenangan menjadi kunci sukses program peningkatan akses pendidikan

3. Strategi peningkatan kerjasama antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten.
4. Strategi peningkatan anggaran pendidikan 20%
5. Mewujudkan dan mengkampanyekan gerakan wajib belajar 12 tahun dengan melibatkan stakeholder.
6. Pemerataan dan penambahan tenaga pendidik kependidikan Program pengembangan model *back to school*.

Dengan adanya strategi tersebut diharapkan pendidikan di Indonesia sendiri akan menjadi lebih baik. Pendidikan sendiri memiliki keterkaitan dengan produktivitas seseorang. Hal ini dapat dilihat ketika Semakin tinggi tingkat pendidikannya maka kesempatan mendapat pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar, dan berpengaruh pada pendapatan dan gaji yang lebih tinggi kemudian akan memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi keluarganya, sebaliknya pendapatan perkapita dapat memperlancar pendidikan.

Penjelasan diatas dapat di tampilkan pendapatan perkapita menggunakan indikator PDRB perkapita atas harga konstan pada tabel 1.4 yang mana pada, tabel di bawah ini menampilkan jumlah dan laju Pendapatan perkapita di Indonesia pada tahun 2014-2021:

Tabel 1.4 PDRB Perkapita atas dasar harga konstan
di Indonesia
Tahun 2014-2021 (RibuRupiah)

Tahun	PDRB Per kapita (Rp)	Laju(%)
2014	34127.72	-
2015	35161.89	3,03
2016	36468.62	3,72
2017	37851.37	3,79
2018	39340.56	3,93
2019	41021.61	4,27
2020	39778.89	-3,03
2021	40775.88	2,51

Sumber : Badan Pusat Statistik,(BPS 2022)

Table 1.4 diatas PDRB perkapita di Indonesi tertinggi berada pada tahun 2021 sebesar 40775.88 ribu rupiah. Sedangkan PDRB perkapita terendah berada pada tahun 2014 sebesar 34127.72 ribu rupiah. Sementara itu jika dilihat secara keseluruhan di Indonesia rata-rata laju PDRB perkapita mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2019 namun, pada tahun 2020 PDRB perkapita mengalami penurunan sebesar -3,03 hal ini disebabkan oleh Covid-19. Menurut *world bank country* menunjukkna bahwa pandemi covid-19 menyebabkan penurunan pendapatan perkapita hampir disemua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Penurunan ini membuat indonesia kembali masuk pada kategori berpendapatan bawah (kementrian keuangan,2021)

Terjadinya penurunan Pendapatan Perkapita akan mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) di Indonesia dimana ketika terjadinya penurunan

Pendapatan Perkapita di Indonesia berakibat pada menurunnya angka partisipasi murni di Indonesia namun, sebaliknya ketika pendapatan perkapita meningkat maka angka partisipasi murni di Indonesia akan meningkat hal ini juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Elfarabi, 2018) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara PDRB perkapita terhadap angka partisipasi kasar serta penelitian yang dilakukan oleh (Fibriani, 2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara DPRB perkapita terhadap angka partisipasi murni.

Tingkat kemiskinan adalah presentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinn yang mana tingkat kemiskinan ini diukur menggunakan Presentase Penduduk Miskin (BPS 2022). Presentase penduduk miskin di provinsi-provinsi di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2019 sebagaimana terlihat pada table 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2014-2021 (dalam persen)

Tahun	Presentase Penduduk Miskin (%)	Laju(%)
2014	10.96	-
2015	11.13	1,52
2016	10.70	-3.86
2017	10.12	-5.42
2018	9.66	-4.55
2019	9.22	-4.55
2020	10.19	10.52
2021	9.71	-4.71

Sumber : Badan Pusat Statistik,(BPS 2022)

Pada table 1.5 di atas kemiskinan di Indonesia yang diukur dengan presentase penduduk miskin yang mana presentase penduduk miskin terendah pada tahun

2021 sebesar 9,71 persen. Sedangkan presentase penduduk miskin tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 11,13 persen..

Rata-rata laju presentase penduduk miskin di Indonesia cukup mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 presentase penduduk miskin mengalami peningkatan signifikan sebesar 10,52 persen hal ini tentu saja diakibatkan oleh covid-19 yang mana ini berdampak buruk bagi suatu negara seperti terjadinya guncangan ekonomi dimana guncangan ekonomi baru ini akan memunculkan orang miskin baru yang mana ini akan membuat masyarakat miskin menjadi makin miskin (Baktinews,2020). Hal ini juga berdampak pada pendidikan ketika masyarakat tidak mampu untuk membiayai pendidikan sehingga membuat keluarganya menjadi putus sekolah, sehingga jika kemiskinan meningkat yang mana ini akan berpengaruh terhadap angka partisipasi murni SMA, dimana ketika presentase penduduk miskin meningkat maka angka partisipasi murni akan menurun di Indonesia, sebaliknya jika presentase penduduk miskin menurun maka angka partisipasi murni di Indonesia akan meningkat. Pernyataan ini dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herlita et al,2019) yang menyatakan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap angka partisipasi kasar SMK. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadi,2020) menyatakan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap RLS. Dimana rata-rata lama sekolah mencakup secara luas sedangkan angka partisipasi murni mencakup pendidikan yang sesuai dengan umur dan jenjang pendidikan sehingga peneliti lebih fokus pada APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

Permasalahan serta prokontra yang dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (*gap*) dijelaskan diatas adalah penelitian ini menggunakan variable dependen yaitu APM yang mana APM dalam penelitian ini terfokus pada angka partisipasi murni karena menggunakan usia pada jenjang tertentu seperti pada penelitian ini menggunakan angka partisipasi murni pada jenjang sekolah menengah atas pada usia 16-18 tahun yang bersekolah tepat pada waktunya, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan angka partisipasi kasar, angka parrtisipasi sekolah dan rata lama sekolah yang mana tidak adanya batasan usia dalam memasuki jenjang pendidikan sesuai dengan umur atau cakupan usia yang lebih luas dan pemilihan variable independen yang berbeda serta cakupan wilayah dan tahun dalam penelitian ini juga berbeda.

Berdasarkan Uraian di atas, penulis dapat mengangkat judul **Pengaruh Pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan, Pendapatan perkapita dan Kemiskinan Terhadap APM SMA di Indonesia tahun 2014-2021 .**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka memicu pertanyaan yang penting untuk dijawab seperti:

1. Seauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendiddian terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia?
2. Seauhmana pengaruh pendapatan perkapita terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia?

3. Sejauhmana pengaruh kemiskinan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia?
4. Sejauhmana pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, pendapatan perkapita , kemiskinan secara simultan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

1.3 Tujuan

Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Pendapatan perkapita terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
3. Mengetahui kemiskinan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh belanja bidang pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan secara simultan terhadap APM SMA Provinsi-provinsi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang di dapatkan dari penelitian ini:

1. Masyarakat

Dari hasil penelitian ini dapat dipakai untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, Pendapatan perkapita, kemiskinan terhadap angka partisipasi murni SMA Provinsi-provinsi

di Indonesia guna meningkatkan kualitas pendidikan serta perlunya pendidikan bagi masyarakat.

2. Mahasiswa

Adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian yang sama yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya.

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD dan pengambilan keputusan di masa mendatang.